

UPAYA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN PENYU ILEGAL DI PORVINSI BALI TAHUN 2008-2013

Oleh :

Molisa Teresa Pardede*
molisateresa_pardede@yahoo.com

Pembimbing : Den Yealta, M.Phil

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

This study describes the role of WWF in deadling turtle trade in Bali. The study also describes the condition of the turtle trade in Bali. WWF is one of the leading conservation organization in the independent world, which is committed to the community and government leaders in Bali. Turtle has been listed as an Appendix I species (endangered) in CITES, yang means all commercial trade in animals or part of the body is also prohibited. Data collection techniques used in this research is a case study in linking theory with data obtained through library research. Data obtained from books, journals, magazines, newspapers and other sources (analysis of documents). I also use the internet facility in the process of data collection related and relevant to the issues discussed in this study. The author uses the theory to explain the role of international organizations and the theory of pluralism. The conclusion of this study found that the WWF has been monitoring the turtle trade in Bali. WWF also tried to connect and engage all stakeholders in adresing turtle trade in Bali. Training and education for the public and the actors involved in engaging in the trade and use of tiger. WWF has been working closely with government agencies, as well as the surrounding environment to help organizations overcome the turtle trade. WWF turtle managed to reduce level of through support for education, law, and also help in the campaign progressed turtle trade in Bali.

Keywords: WWF, Bali, turtle trade, CITES

* Mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau angkatan 2011

Pendahuluan

Perdagangan ilegal terhadap perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies langka di Indonesia. Bali yang merupakan salah satu provinsi yang menjadi tempat keberlangsungan hidup penyu, menjadi salah satu kawasan yang menjadi salah satu

tempat favorit para pelaku perdagangan penyu untuk memperdagangkan satwa tersebut secara bebas. Ada 6 jenis penyu di Indonesia , yaitu penyu hijau/*green turtle* (*Chelonia mydas*), penyu sisik/*hawksbill turtle* (*Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing/*leatherback turtle* (*Dennochelys coricea*), penyu lekang/*oliveridley turtle* (*kepidchelys olivacea*), penyu tempayani *loggerhead turtle* (*Caretta caretta*) dan

penyu pipih/*flatback turtle* (*Natator depressa*)).¹ Melihat bahaya dari bahaya perdagangan ilegal penyu di Provinsi Bali, WWF berupaya untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut dengan cara bekerjasama sama dengan Pemerintah Bali dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk pencegahan agar populasi Penyu di Bali tidak menurun.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok pemerintah pada negara yang berbeda (Rudi, T. May. 1993:3) Berdasarkan konsep diatas bahwa WWF diartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini organisasi internasional yang terklasifikasi dalam kategori INGO's (Inter Non Governmental Organization) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja dan fungsinya tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi visi misi dari WWF itu sendiri.

2. Teori Pluralisme

Asumsi yang dinyatakan oleh kaum pluralisme adalah bahwa aktor negara tidak hanya sebagai aktor

tunggal di dalam hubungan internasional, tetapi ada aktor lainnya yaitu aktor non negara termasuk pula di dalamnya kaum sosial. Kaum pluralisme memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu menjadi aktor utama dan aktor tunggal.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang memaparkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Analisa kualitatif dilakukan di mulai dengan spesifikasi teori dan membangun kerangka berpikir berdasarkan teori peranan, teori organisasi interbasional dan teori pluralisme. Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dengan data-data yang di dapatkan melalui riset perpustakaan (*library research*). Data – data tersebut di dapat dari buku – buku, jurnal, dan sumber lainnya (*document analysis*) dan juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang di bahas penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Perubahan sistem internasional saat ini berpengaruh kepada isu-isu yang berkembang dalam tatanan internasional. Memasuki tahun 1990-an muncul istilah baru dalam hubungan internasional, yaitu *the new world order* (tata dunia baru) dan *the new economic order* (tata ekonomi dunia baru) yang memfokuskan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kerjasama ekonomi dan usaha yang menjembatani kepentingan ekonomi Utara (negara-negara maju) dengan Selatan (negara-negara berkembang dan miskin). Dewasa ini sering terjadi peruhan besar dan mendasar dalam tata dunia, transformasi dari

¹ Penyu Menjadi Primadona Perburuan Ilegal (Volume XI No.3_Jul - Sep 2007) - Media Informasi ProFauna Indonesia.htm(diakses pada tanggal 14November 2014 pukul 18.42 WIB)

era perang antara Amerika Serikat(AS)-Uni Soviet ke perang dagang AS-Uni Eropa; pergeseran isu keamanan dan militer menjadi isu keamanan non-militer, seperti ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi, demokrasi, kesehatan dan lain sebagainya; dan perubahan menjadi multipolar.² Ada banyak aktor seperti Inter-Governmental Organization(IGOs) seperti IMF, IBRD dan WTO, Non-Governmental Organization(NGOs) seperti Green Peace, IRC, dan WWF; dan Multi National Corporations(MNCs) seperti McDonald, Caltex, dan Del Monte.³ Dewasa ini bukan hanya isu politik militer saja namun juga isu ekonomi semakin meluas ke permasalahan sosial dan politik domestik. Isu-isu yang dimaksud adalah isu tentang masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesehatan, perburuan, demokrasi, gender, dan lain sebagainya. Masalah inilah yang menjadi tanggungjawab setiap aktor internasional. WWF sebagai aktor non negara yang saat ini juga ikut berperan dalam aktivitas internasional terutama dalam isu-isu non politik dan ekonomi yang focus pada isu-isu lingkungan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam aktivitas internasional. WWF(*World Wide Fund For Nature*) dikenal sebagai organisasi konservasi independen terbesar di dunia, sejak didirikan pada tahun 1961, WWF telah berkomitmen untuk perlindungan lingkungan di dunia dengan hampir 5,2juta pendukung dan jaringan yang aktif di lebih dari 100 negara. WWF mendukung kampanye anti perburuan, membantu pemantauan dan pengendalian perdagangan

²Yuniarti.*Perubahan Pola Hubungan*

Internasional 1990-An Dan Pengaruhnya

Terhadap Realism Versus Idealisme. Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas

Mulawarman:2010. Jurnal Sosial Politika Vol.17

No.1 Juli 2010 Hal: 3

³ Ibid hal : 6

illegal, memperkuat perlindungan habitat penyu, membantu mengurangi konflik lokal antara penyu dengan manusia, melaksanakan program pelatihan dan pengelola kawasan lindung, dan melakukan berbagai pendidikan umum dan inisiatif kesadaran publik atau kesadaran masyarakat. Salah satu negara yang menjadi wilayah kerja WWF adalah negara Indonesia. WWF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia terkhusus dengan pemerintah Bali dengan melakukan pemantauan dan juga program dalam membantu meningkatkan jumlah populasi penyu di alam liar dan juga bekerjasama dalam mengatasi perdagangan penyu secara bebas.

TRAFFIC atau jaringan pemantauan terhadap perdagangan satwa liar, merupakan program dari WWF untuk memastikan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar bukan merupakan ancaman bagi konservasi alam. Didirikan pada tahun 1976, TRAFFIC membantu dalam pelaksanaan CITES, Konservasi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah Flora dan Fauna Liar, yang melarang perdagangan komersil internasional spesies terancam punah. Konservasi Penyu merupakan wujud dari pelaksanaan CITES yang dilakukan oleh WWF dan pemerintah Bali bekerjasama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya penyu untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu digunakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan sumberdaya penyu, penangkapan dan pengambilan telur yang masih belum memadai, hal ini disebabkan antara lain oleh jauhnya lokasi, kurangnya aparat, kurangnya sarana prasarana pengawasan, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian menyebabkan masih terjadi pemanfaatan sumber daya

penyu tanpa diikuti dengan upaya pelestariannya. Melihat hal ini, WWF dan pemerintah Bali bekerjasama mendirikan kawasan yang akan dijadikan sebagai pusat konservasi. Pusat Konservasi dan Pendidikan Penyu yang sering dikenal dengan istilah TCEC (*Turtle Conservation and Education*) yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali, Dewa Barata, pada 20 Januari 2006 di Pulau Serangan, Bali. Penetapan TCEC didukung oleh WWF, Gubernur Bali, Walikota Denpasar, serta BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Bali dan masyarakat lokal. TCEC dibangun sebagai bagian dari strategi yang komprehensif untuk menghapus perdagangan penyu ilegal di pulau Serangan. TCEC ini memanfaatkan potensinya untuk pendidikan, pariwisata, konservasi serta penelitian, dengan sentuhan bisnis, untuk memberikan kesempatan baru bagi penyu yang terancam punah di Serangan. Hal ini untuk mengendalikan dengan ketat penggunaannya; membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Serangan; dan pada akhirnya menjadi pengawas bagi perdagangan penyu khususnya di Serangan, dan secara umum di Bali. Upaya konservasi yang dilakukan TCEC juga meluas hingga ke pulau Jawa, untuk melindungi pantai tempat panyu bertelur yang sering dijajah oleh para pedagang telur penyu. Cara yang direncanakan pada saat dibukanya balai konservasi adalah dengan cara melakukan pembinaan dan pendamping kepada kelompok pelestari penyu di beberapa habitat peneluran penyu, sehingga Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Bali telah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi kelompok Pelestari Penyu pada tahun 2007. Pemerintah dan WWF serta organisasi yang mempunyai misi untuk menyelamatkan lingkungan juga mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan keberlangsungan hidup penyu di alam kepada masyarakat di Indonesia terkhususnya di Bali. Kegiatan

penyuluhan tentang status populasi dan biologi penyu maupun hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan melibatkan pemerintah daerah, pemuka adat dan agama, generasi muda, masyarakat ilmiah serta pencinta alam. Bekerjasama dengan lembaga penegak hukum melalui pelatihan kapasitas memastikan peraturan yang berlaku efektif. Sebagai contoh adalah penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pedagang penyu dengan jumlah yang sangat tinggi sehingga mendapat julukan sebagai “si raja penyu” yang bernama Wewe ke pengadilan dan divonis penjara 1 tahun. Menanggapi masalah krisis menurunnya jumlah populasi penyu WWF dan Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan program revitalisasi, yaitu Pusat Konservasi dan Pendidikan Penyu yang sering dikenal dengan istilah TCEC (*Turtle Conservation and Education*). Selama itu masih banyak pantai peneluran penyu yang belum ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam⁴.

Kesimpulan

Perdagangan penyu khususnya di Bali menjadi perhatian serius dari dunia internasional. Penyu termasuk ke dalam satwa golongan *Appendix I* yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. WWF aktif di Bali dan mendirikan kantor perwakilannya di kota Denpasar guna mengontrol perdagangan penyu ilegal dan mengurangi konsumsi penyu di Bali.

Program yang dikerjakan oleh WWF dan Pemerintah Bali sangat baik, dan menghasilkan hasil yang baik ditengah maraknya perdagangan penyu secara ilegal. Namun, segala upaya yang dilakukan oleh WWF dan Pemerintah Provinsi Bali tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dikarenakan penduduk lokal di Bali masih

⁴www.menlh.go.id/pengelolaan-penyu-di-indonesia/ diakses pada tanggal 23 Mei 2015 pukul 13.24 WIB

memegang teguh sejarah penyu dan masih menganggap penyu adalah hewan sakral yang harus di makan atau yang harus ada di setiap upacara keagamaan.

Daftar Pustaka

Yuniarti.*Perubahan Pola Hubungan Internasional 1990-An Dan Pengaruhnya Terhadap Realism Versus Idealisme.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Mulawarman:2010. Jurnal Sosial Politika Vol.17 No.1 Juli 2010 Hal: 3

Penyu Menjadi Primadona Perburuan Ilegal (Volume XI No.3_Jul - Sep 2007) - Media Informasi ProFauna Indonesia.htm(diakses pada tanggal 14November 2014 pukul 18.42 WIB)

[www.menlh.go.id/pengelolaan penyu di Indonesia/](http://www.menlh.go.id/pengelolaan_penyu_di_Indonesia/) diakses pada tanggal 23Mei 2015 pukul 13.24WIB